

EBI JATENG & DIY

Bisnis Indonesia, Jumat, 10 Februari 2012

Realita & tantangan di daerah perbatasan

Desa Woslay adalah satu desa di ujung timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Di desa yang merupakan bagian dari Negeri Indonesia yang telah merdeka hampir 67 tahun ini tidak ada listrik.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan berbagai tawaran jasa dari operator telepon seluler, di daerah tersebut tidak ada sinyal sehingga sulit berkomunikasi dengan orang di luar daerah tersebut dengan segera. Untunglah pada hari terakhir saya di sana, satu operator telepon seluler dapat dirasakan manfaatnya, sehingga begitu mendapatkan sinyal warga masyarakat segera mengabarkan kondisinya kepada sanak keluarga di tempat lain.

Kondisi masyarakat di daerah ini sangat sederhana dan bersahaja. Rata-rata rumah penduduk berlantai tanah dan dinding dari papan. Sebagian besar warga mengelola lahan pertanian untuk bertahan hidup. Akses menuju daerah ini dari pusat kota sangat jauh dan tidak tersedia angkutan umum. Jika masyarakat akan ke kota harus menyewa mobil atau pesawat dengan harga mahal. Jalan menuju kota juga rusak karena pergeseran tanah. Ironi ini sangat memprihatinkan di tengah

OLEH YUSNI WARASTUTI

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi
Unika Soegijapranata Semarang



perkembangan daerah lain dan tingginya potensi daerah yang dimiliki.

Itu adalah satu potret daerah perbatasan. Bagaimana penduduk daerah perbatasan tidak tergiur 'menyeberang' ke negara tetangga karena masalah ekonomi? Jawaban pertanyaan ini adalah pengentasan kemiskinan daerah perbatasan. Bagaimana caranya? Agar tidak memunculkan masalah baru mestinya dengan menjadikan daerah tersebut mandiri.

Untuk dapat mandiri maka optimalisasi potensi daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Berdasarkan informasi dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, penanganan kawasan perbatasan merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan serta kesenjangan. Lantas bagaimana peran pemerintah untuk bisa mencapai tujuan tersebut?

Untuk pengembangan

bidang ekonomi daerah perbatasan, fungsi pemerintah antara lain menciptakan iklim usaha yang kondusif, di antaranya melalui penyerahan perizinan dan juga jaminan keamanan, sehingga investor/pihak swasta dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.

Selain itu, perbaikan dan atau pembangunan infrastruktur. Jika hal ini dilakukan, akses ke daerah perbatasan akan lebih mudah. Ketersediaan infrastruktur ini penting, karena menjadi penggerak ekonomi.

Pemerintah perlu mengembangkan potensi sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan/tertinggal untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.

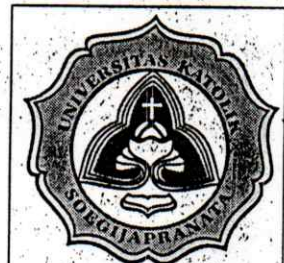
Pengembangan potensi ini dapat diawali dengan merubah pola pikir masyarakat. Untuk itu diperlukan pendampingan dan pela-

ntikan dari berbagai pihak terutama pemerintah.

Setelah sumber daya manusia terbentuk menjadi pribadi yang mau maju dan memiliki ketangguhan menghadapi berbagai tantangan, maka mereka akan berfikir bagaimana mengoptimalkan potensi daerah.

Dengan iklim investasi yang mendukung setelah adanya peningkatan aksesibilitas pihak luar dan perbaikan infrastruktur maka potensi daerah dapat dikembangkan secara maksimal.

Pemerintah dapat menggendeng perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* di daerah tersebut. Sumber daya alam dan sumber daya masyarakat dapat dikembangkan secara optimal sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan semoga sesama warga Indonesia, di daerah perbatasan ini juga merasakan kemerdekaan.



Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan
Dumur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 Fax 024-8445265